

MODERASI BERAGAMA SEBAGAI UPAYA PENGURAI EKSKLUSIVITAS BERAGAMA DAN PENDORONG KOHESI SOSIAL

RELIGIOUS MODERATION AS AN EFFORT TO DISINTEGRATE RELIGIOUS EXCLUSIVITY AND A DRIVER TO SOCIAL COHESION

Omta Purba*

*Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

*) omta.purba@gmail.com

ABSTRACT

Entering its third year after its launch, the campaign for religious moderation has become a discourse that increasingly echoed within the realm of the Ministry of Religion in particular and Indonesia in general. This paper aims to provide another perspective in studying religious moderation, namely sociology. This paper uses the literature review research method that shows the following results. First, religious moderation is a decoder of exclusivity in educational institutions. Second, religious moderation is a driver of social cohesion through the use of local wisdom and digital media, as well as the contribution of individual/group figures. In the end, efforts to unravel religious exclusivity and encourage the creation of social cohesion in society must be carried within three pillars, namely moderation of thought, moderation of action, and moderation of movement with the core directions of the ministry of religion.

Keywords: *religious moderation, social cohesion, exclusivity*

ABSTRAK

Memasuki tahun ketiga setelah diluncurkan, kampanye moderasi beragama telah menjadi diskursus yang semakin sering digaungkan dalam ranah Kementerian Agama secara khusus dan Indonesia secara umum. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sudut pandang lain dalam mengkaji moderasi beragama yaitu sosiologi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka yang menunjukkan hasil sebagai berikut. Pertama, moderasi beragama sebagai pengurai eksklusivitas dalam lembaga pendidikan. Kedua, moderasi beragama sebagai pendorong kohesi sosial melalui pemanfaatan kearifan lokal dan media digital, serta kontribusi figur individu/ kelompok. Pada akhirnya, upaya untuk mengurai eksklusivitas beragama dan sekaligus mendorong keterciptaan kohesi sosial dalam masyarakat harus dilakukan dalam 3 pilar yaitu moderasi berpikir, moderasi bertindak dan moderasi gerakan sesuai dengan arahan inti dari kementerian agama.

Kata Kunci: *moderasi beragama, kohesi sosial, eksklusivitas*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya, agama, ras, etnis, bahasa dan sebagainya (Akhmadi, 2019). Keberagaman tersebut dapat dipahami sebagai potensi luar biasa atau bahkan sebaliknya dapat dipahami sebagai bahaya yang mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia (Hasan, 2021). Dengan kata lain, keberagaman tersebut juga sering disebut sebagai “*integrating force*” yang mampu mengikat masyarakat atau melahirkan beragam benturan dalam banyak ranah, utamanya pada ranah agama (Akhmadi, 2019). Keberagaman agama pada masyarakat Indonesia telah menjadi “*integrating force*” yang mampu menyatukan masyarakat, serta sekaligus menjadi sumber konflik tiada tara apabila tidak didasari dengan pemahaman agama yang benar. Konflik antar umat beragama atau konflik yang mengatasnamakan agama yang terjadi di Indonesia telah terjadi secara nyata dalam sejarah Republik Indonesia. Beberapa konflik agama tersebut seperti yang terjadi di Poso, konflik Sunni

dan Syiah di Jawa Timur, konflik agama di Bogor, dan seterusnya.

Fenomena konflik agama yang terjadi dalam sejarah Republik Indonesia tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa telah terjadi kegagalan dalam menciptakan masyarakat yang multikultural serta ketidakmampuan agama sebagai “*integrating force*” yang mampu menyatukan Masyarakat (Wibisono, 2021). Hal tersebut juga diperparah dengan penetrasi pandangan radikal yang mulai terjadi pada generasi muda. Pandangan radikal tersebut dibawa melalui beragam institusi pendidikan secara masif sehingga dikhawatirkan para peserta didik dalam setiap institusi pendidikan akan memiliki sikap dan pandangan yang intoleran dan radikal (Sutrisno, 2019). Lebih lanjut bahkan pandangan radikal tidak hanya menasar para peserta didik saja, namun juga para tenaga pendidik yang seharusnya bisa menangkal penetrasi pandangan radikal dan berbagai bentuk ekstrimisme yang terjadi dalam institusi pendidikan.

Pada masa kepemimpinan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin, Kementerian Agama telah meluncurkan kampanye program moderasi beragama. Kampanye ini merupakan salah satu upaya yang diyakini dapat mengurai bentuk ekstrimisme agama yang belakangan ini sering terjadi. Urgensi daripada program ini dapat terlihat dari pemrioritasannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lebih lanjut, program tersebut juga melahirkan Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama (Pokja IMA) dengan tujuan menguatkan dan mengembangkan moderasi beragama secara khusus pada institusi pendidikan.

Moderasi beragama sebagai sebuah program diharapkan dapat memenuhi ekspektasi pemerintah dalam hal pengelolaan kemajemukan bangsa dan pengakomodiran perbedaan melalui sikap toleransi dan kesetaraan. Terdapat tiga urgensi alasan penerapan moderasi beragama di Republik Indonesia. Pertama adalah bahwa agama sejatinya memiliki esensi untuk menjaga hak asasi dan martabat manusia sebagai individu. Kedua yaitu perkembangan dan penyebaran umat manusia melahirkan penyebaran agama yang dipengaruhi oleh kepentingan sosial dan politiknya. Sedangkan ketiga adalah Indonesia memiliki urgensi untuk mempraktikkan moderasi beragama sebagai strategi budaya dalam merawat heterogenitas bangsa (Syamsurijal et al., 2022).

Sesungguhnya konsep inti moderasi beragama bukan lagi hal baru dalam konteks masyarakat Indonesia, namun telah ada dan mengakar dalam setiap agama di Indonesia. Hal ini terlihat dalam ajaran beberapa agama mayoritas yang diakui di Indonesia. Pertama, agama Islam telah memperkenalkan konsep *wasathiyah* atau berpadanan dengan kata *tawwasuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Kedua, dalam agama Kristen, ketika menghadapi ekstrimisme tafsir agamanya, konsep moderasi beragama "*golden mean*" dimanfaatkan sebagai penangkal untuk hal tersebut. Sementara ketiga, dalam ajaran agama Katolik, meskipun istilah "moderat" kurang dikenal, namun istilah dan konsep "terbuka" dapat dimanfaatkan dalam menghadapi kelompok fundamental dan tradisional dalam umat Katolik. Keempat, ajaran agama Hindu yaitu "*madyhamika*" mengisyaratkan pemahaman moderasi beragama yang telah eksis sejak ribuan tahun lalu, dan juga yang tertuang dalam istilah ajaran "empat yuga". Dimana dalam ajaran tersebut, ditekankan konsep moderasi dalam mengatasi dinamika zaman sekaligus melakukan penyesuaian terhadap sejarah. Sementara kelima, dalam agama Budha, inti pokok Pencerahan Sang Budha tentang bagaimana menjaga hubungan harmonis dengan sesama manusia menjadi ajaran pokok Sidharta Gautama yang sejalan dengan konsep moderasi beragama seperti tradisi ajaran *Majjhima Patipada* (Sutrisno, 2019). Keenam, konsep *Zhong Yong* juga mengajak menjajaki jalan tengah dalam ajaran agama Konghucu. Jauh sebelumnya, bahkan konsep moderasi telah menjadi prinsip hidup yang dikenal dalam mitologi Yunani. Dimana terdapat sebuah inkripsi patung Apollo yang bertuliskan *Meden Agan*, dengan makna "tidak berlebihan" (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Sejumlah peneliti menimbang tentang bagaimana urgensi penyemaian kampanye moderasi

beragama di lingkup pendidikan, sehingga mereka melakukan beragam penelitian kampanye moderasi beragama dalam lingkup pendidikan tinggi (Hefni, 2020); (Afwadzi & Miski, 2021) dan pendidikan dasar dan menengah (Muhamad Syaikhul & Munib, 2021); (Habibie et al., 2021); (Abidin, 2021); (Purbajati, 2020); (Nurdin & Naqqiyah, 2019); (Purnomo et al., 2022). Dimana mereka menemukan bagaimana aktualisasi konsep moderasi beragama dapat bertumbuh atau bahkan dicegah dalam lingkup institusi pendidikan yang sebenarnya juga dapat sekaligus menjadi ladang penyemaian intoleransi dalam beragama.

Selain itu sejumlah penelitian juga telah menyoroti bagaimana peran individu atau kelompok atau komunitas dalam membumikan kampanye moderasi beragama ini (Rahayu & Lesmana, 2020). Kemudian penelitian lain juga menyoroti bagaimana kearifan lokal ((Pajarianto et al., 2022); (Sumbulah et al., 2022)), media dan ruang digital ((Aini et al., 2022); (Hefni, 2020); (Desky, 2022)) memegang peran penting dalam membumikan kampanye moderasi beragama pada berbagai ranah.

Seperti halnya dalam ranah ilmu sosial, konsep moderasi beragama ini sejalan dengan konsep inklusivisme dan kohesivisme. Dimana dalam ranah agama, kedua konsep tersebut dimaknai sebagai pengikat ataupun magnet yang dapat mengikat sekaligus menarik anggota dari setiap kelompok tersebut untuk tetap berada pada kelompoknya.

Moderasi beragama diyakini sebagai sebuah jalan tengah dalam cara beragama masyarakat majemuk. Dimana dalam praktiknya, konsep moderasi beragama ini mengedepankan ketidakesktrيمان dan tidak berlebihan dalam melakukan praktik ajaran agamanya. Sehingga dengan demikian individu yang melakukan praktik moderasi ini akan disebut dengan individu yang moderat (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019).

Selanjutnya, Kementerian Agama menyadari bahwa deskripsi moderasi dalam konteks keindonesiaan didasarkan pada tiga pilar, yaitu: moderasi berpikir, moderasi gerakan, dan moderasi tindakan. Dimana moderasi berpikir menekankan kombinasi antara teks dan konteks yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman moderasi individu/kelompok. Sementara moderasi gerakan dipahami sebagai upaya menyebarkan agama dengan prinsip kebaikan. Kemudian moderasi tindakan berfokus pada penguatan relasi antara agama, budaya, dan tradisi yang melekat pada komunitas lokal.

Kementerian Agama juga melalui setiap sosialisasi dan kampanye moderasi beragamanya, menekankan pada empat indikator utama yaitu pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menolak tindak kekerasan; kedua, mengedepankan toleransi; ketiga, memegang erat komitmen kebangsaan; dan keempat, tindakan akomodatif terhadap budaya masyarakat lokal.

Kemunculan kampanye moderasi beragama sebagai salah satu ikhtiar untuk menangkal radikalisme, teorisme dan beragam sikap intoleran maupun anarkis individu/kelompok umat beragama ini kemudian sejalan dengan prinsip inklusivisme yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui kementerian agama. Dimana

inklusivisme merujuk pada sikap keagamaan yang lebih mengedepankan pemahaman bahwa di luar keyakinan agamanya sendiri, ternyata terdapat pula kebenaran lain, meskipun masih dalam pendirian tertentu yang meyakini bahwa kebenaran di luar tersebut tidak seutuh dan sepeenuh kebenaran agama yang dimilikinya tersebut. Inklusivisme ini berseberangan dengan konsep eksklusivisme yang memiliki pemahaman bahwa hanya pemahaman agamanya saja yang paling benar dan sekaligus menafikkan kebenaran pemahaman agama yang lain (Hanafi, 2011).

Sementara itu, selain mengejar inklusivisme, konsep moderasi beragama juga lekat dengan kohesi sosial. Dimana kohesi sosial merujuk pada suatu kondisi ketika individu atau kelompok dengan kepemilikan latar belakang budaya, nilai-nilai, keyakinan, gaya hidup, dan sumber daya sosial-ekonomi yang berbeda, memiliki akses yang sama terhadap semua domain kehidupan sosial sehingga mampu hidup secara berdampingan tanpa menimbulkan konflik (Gough & Olofsson, 1999).

Kedua konsep tersebut di atas, sudah cukup jelas dalam menggambarkan kehidupan sosial khas masyarakat plural dan multikultural yang ingin dicapai melalui kampanye moderasi beragama. Dengan demikian, artikel ini mencoba mengurai lebih lanjut bagaimana konsep eksklusivitas yang ingin diurai dan konsep kohesi sosial yang ingin dicapai lewat penelusuran terhadap sejumlah penelitian dengan topik terkait. Hal ini dilakukan mengingat urgensi dalam mengurai konflik antar bahkan intra umat beragama yang ada di Indonesia saat ini.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang menekankan pada upaya memahami beragam konsep, teori dan data yang bersumber dari beragam literatur yang terkait dengan topik artikel yang diurai (Rijal Fadli, 2021). Melalui metode studi pustaka ini, pengumpulan data dilakukan dengan memaksimalkan beragam sumber seperti buku, jurnal dan riset terkait yang telah terlebih dahulu mengurai tentang moderasi beragam pada beragam ranah. Lebih lanjut, hasil riset atau jurnal yang digunakan pada artikel ini dibatasi pada keluaran kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini dilakukan bukan hanya karena gaung moderasi beragama yang memang baru eksis sekitar beberapa tahun terakhir, namun juga sejalan dalam prinsip kebaruan sumber dalam penyusunan hingga penyajian artikel.

HASIL

Moderasi Beragama sebagai Pengurai Eksklusivitas dalam Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan dalam berbagai jenjangnya telah secara nyata menjadi miniatur pluralisme dan multikulturalisme dalam masyarakat. Lembaga pendidikan telah menjadi tempat bertemunya individu dan kelompok yang berasal dari beragam latar belakang agama, etnis, daerah asal, nilai dan keyakinan yang beragam. Hal ini sebenarnya dapat menjadi modal besar dalam meningkatkan inklusivitas dan mengurangi

eksklusivitas yang dapat muncul dalam setiap interaksi baik antar peserta didik maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Lembaga pendidikan seyogyanya merupakan ranah netral yang dapat dimaksimalkan dalam membangun kesatuan dan mengurangi beragam perbedaan yang mungkin muncul dalam proses panjang pendidikan tersebut.

Meskipun dalam beberapa kasus, lembaga pendidikan, secara khusus tingkat pendidikan tinggi baik sekolah tinggi, institut, maupun universitas telah menjadi sasaran telak dari individu atau kelompok yang ingin mempertebal eksklusivitas beragama kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Terlebih lagi, kaum terdidik dalam pendidikan tinggi yang diasumsikan memiliki penalaran dan pertimbangan yang baik terhadap unsur yang dapat merusak tatanan pluralisme yang sudah ada sebelumnya, tampak gamang dan cenderung mudah disusupi oleh paham radikalisme dan intoleransi. Pada akhirnya, lembaga pendidikan tinggi menjadi salah satu wadah penyemaian intoleransi dan radikalisme yang subur, sehingga menjadi sasaran tepat dalam menyemai tindakan destruktif oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa penelitian terkait moderasi beragama telah menyoroti betapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga tinggi merupakan ladang penyemaian atau pembibitan dari kampanye besar moderasi beragama dalam rangka mengurai konflik dan beragam sikap intoleran pada masyarakat plural seperti Indonesia. Lembaga pendidikan dapat menjadi rumah yang baik untuk mengokohkan filosofi dasar dari moderasi beragama. Hal ini diperlukan untuk menyebarkan dan menginternalisasikan sensitivitas dari kaum terdidik dan pendidik dalam mengelola nalar perbedaan serta sekaligus menguatkan intelektualisme yang moderat di antara beragam perbedaan pendapat yang menjadi keniscayaan dalam masyarakat plural tadi (Hefni, 2020).

Purbajati (2020) menangkap keresahan akan kemungkinan besar ancaman konflik yang bisa melahirkan beragam tindakan radikal, ekstrem dan kebencian antar individu/kelompok sejak dini yaitu pada bangku sekolah. Lebih lanjut, riset tersebut menyoroti pentingnya peran guru dalam melakukan internalisasi nilai moderasi beragama sejak dini di sekolah. Melalui riset tersebut, terlihat bahwa peran sentral guru yang melakukan interaksi kepada peserta didiknya sehingga menghasilkan penanaman nilai moderasi beragama sedini mungkin, tentu akan mampu mengurai eksklusivitas yang dimungkinkan terjadi setelah peserta didik tersebut menempuh pendidikan lanjutan.

Eksklusivitas beragama juga tidak dapat dipisahkan dari posisi mayoritas umat beragama terhadap keanggotaan anggota umat beragama mayoritas tersebut untuk menjalankan moderasi beragama atau dengan istilah lain menjadi individu atau kelompok umat beragama yang moderat. Habibie *et al.*, (2021) dan Fahri & Zainuri (2019) memaparkan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, agama mayoritas di Indonesia, yang relevan pada segala zaman dan tempat juga secara terang benderang memiliki konsep moderasi beragama seperti yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan artikel ini. Oleh karena itu, dalam riset mereka, semakin dikukuhkan

bahwa semua materi pendidikan Islam yang ditawarkan pada pendidikan tinggi Islam telah memenuhi dan menjunjung tinggi nilai dan prinsip moderasi beragama sesuai arahan Kementerian Agama. Pada akhirnya, akan tercipta baik karakter dan pribadi yang luwes, pluralis, adil, moderat, inklusif dan peduli serta menghalau eksklusivitas dalam pendidikan tinggi Islam tersebut.

Upaya untuk mengurai eksklusivitas dalam ranah pendidikan rendah dan menengah juga teramat dalam beberapa riset yang menggarisbawahi bahwa pengarusutamaan moderasi beragama pada tingkat pendidikan Madrasah dapat ditempuh dalam beberapa cara seperti perumusan visi misi berbasis nilai moderasi beragama, peningkatan kurikulum komprehensif yang sesuai nilai moderasi beragama, upaya habituasi budaya madrasah dalam rangka penginternalisasian nilai dan karakter moderat serta pengembangan program penguatan moderat (Alim & Munib, 2021). Upaya mengurai eksklusivitas seperti yang dilakukan pada tingkat pendidikan menengah ini menjadi penting sebagai upaya lanjutan yang dilakukan setelah mendapatkan internalisasi dalam pendidikan dini. Sebab apabila dilakukan secara berkesinambungan akan memantapkan lahir dan eksisnya kaum terdidik yang moderat.

Pada akhirnya, eksklusivitas yang ingin diurai lewat kampanye moderasi beragama sangat dimungkinkan tercapai dalam lembaga pendidikan. Hal ini dapat tercapai bukan hanya dengan mengandalkan kinerja dari tenaga pendidik atau tenaga kependidikan saja, namun semua pihak terkait yang terdapat dalam jenjang pendidikan tinggi, menengah hingga rendah dapat membuat program penguatan moderasi beragama yang cair sehingga ruang untuk masuknya paham radikal dan intoleransi yang ingin dibasmi tidak akan memperoleh ruang untuk berkembang dalam ranah pendidikan.

Moderasi Beragama sebagai Pendorong Kohesi Sosial melalui Pemanfaatan Kearifan Lokal dan Media Digital, serta Kontribusi dari Figur Individu/ Kelompok

Kampanye moderasi beragama dapat terlihat dalam beragam praktik kehidupan masyarakat plural. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa eksistensi individu/ kelompok yang moderat dapat berkontribusi terhadap terciptanya kohesi sosial dalam masyarakat. Berikut ini akan diuraikan beragam upaya yang dilakukan dalam menggaungkan kampanye moderasi beragama untuk mendorong kohesi sosial tersebut.

Terlebih dahulu, kohesi sosial mengisyaratkan terciptanya relasi sosial, *sense of belonging*, dan orientasi terhadap kebaikan bersama. Selain itu, kohesi sosial juga merupakan fenomena yang dapat diobservasi pada tiga cakupan yaitu mikro, meso dan makro. Dimana pada cakupan mikro, kohesi sosial berfokus pada orientasi dan sikap individual; sedangkan pada cakupan meso akan berfokus pada komunitas dan kelompok; serta pada cakupan makro akan berbicara pada tataran institut sosial.

Kajian sosiologi memahami salah satu faktor penguat kohesi sosial adalah agama. Dalam hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana peran agama sebagai penguat kohesi sosial dalam masyarakat, utamanya yang plural (Abdullah, 2009). Emile Durkheim,

melalui pendekatan teori struktural fungsionalnya, mendeskripsikan bagaimana individu dan kelompok merayakan *power* agama dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, Durkheim mengidentifikasi tiga fungsi agama dalam kehidupan masyarakat. Pertama, agama diyakini dapat menyatukan individu atau kelompok sehingga dapat mempromosikan kohesi sosial. Kedua, agama mampu memberikan dorongan untuk mematuhi norma kultural sehingga melahirkan konformitas dalam masyarakat. Sementara ketiga, agama mampu berkontribusi terhadap pemberian makna dan tujuan kehidupan bagi penganut agama (Maconis, 2012).

Sebagaimana Durkheim menyadari *power* yang dimiliki agama dalam menyatukan masyarakat dan menciptakan kohesi sosial, moderasi beragama merupakan salah satu dari bentuk tindakan kolektif yang mampu dilakukan untuk mendorong penciptaan kohesi sosial tersebut. Meskipun, faktor kampanye moderasi beragama ini bukanlah satu-satunya upaya yang bisa dilakukan untuk mencipta kohesi sosial dan mengurangi tindak radikal lainnya, namun sejumlah riset menunjukkan bahwa kampanye moderasi beragama yang melibatkan figur individu/ kelompok, kearifan lokal, dan pemanfaatan media digital menjadi beragam upaya yang berkontribusi signifikan untuk mencapai tujuan besar tersebut.

Kearifan lokal diyakini sebagai salah satu instrumen penguat eksistensi nilai moderasi beragama ((Saputera & Djauhari, 2021); (Pajarianto et al., 2022); (Sumbulah et al., 2022); (Desky, 2022)). Sejumlah riset ini telah membuktikan percepatan atau pengarusutamaan implementasi nilai moderasi beragama dengan mengindahkan kekhasan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Seperti halnya basis kearifan lokal “*menyama braya*” pada umat beragama Hindu di Kampung Bali, Kab. Langkat (Desky, 2022) atau *tengko situru* (kebersamaan); *karapasan* (kegigihan); dan *kasiuluran* (kekerabatan) pada masyarakat Tongkonan, Sulawesi. Dimana model-model kearifan lokal tersebut dimanfaatkan sebagai pembentuk kohesi sosial melalui setiap proses interaksi sosial mereka.

Kemudian, media digital dan era *internet of thing* sekarang ini juga sangat dipercaya mampu memegang peran signifikan dalam mendorong internalisasi nilai moderasi beragama. Inovasi kampanye moderasi beragama melalui media *youtube* telah berkontribusi cukup signifikan, terlebih lagi apabila menasar kelompok muda yang memang memiliki kecenderungan besar untuk mengakses media *youtube* tersebut (Aini et al., 2022). Pengemasan konten semenarik mungkin dan ditambah dengan topik moderasi beragama yang tergolong baru dalam dekade belakang ini akan menawarkan keingintahuan yang cukup besar bagi kelompok muda di Indonesia. Cakupan penyiaran media digital khususnya media sosial merupakan salah satu ujung tombak penyebaran nilai moderasi beragama yang efektif dalam menggaungkan kohesi sosial dalam tataran yang tidak mampu dilakukan oleh kelompok atau media lain. Pada akhirnya, ruang digital dipercaya sebagai ruang efektif dalam menyemai narasi keagamaan yang mampu mengurai konflik dan sikap eksklusivisme.

Selain itu, peran individu atau kelompok yaitu kelompok guru (Purbajati, 2020) dan kelompok perempuan (Rahayu & Lesmana, 2020) juga memberikan

kontribusi signifikan dalam menciptakan kohesi sosial melalui ranah masing-masing. Kelompok guru berperan membangun moderasi beragama melalui beragam tindakan berikut. *Pertama*, sebagai konservator atau pemelihara nilai-nilai; *kedua*, sebagai inovator atau pengembang nilai pengetahuan; *ketiga*, transmiter, sebagai penerus nilai pengetahuan; *keempat*, transformator, sebagai penerjemah dari sistem nilai pengetahuan; dan *kelima*, organisator, sebagai penyelenggara proses edukasi baik informal dan formal secara bertanggung jawab. Kelima peran guru tersebut diyakini mampu berkontribusi dalam menyampaikan dan menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lingkup sekolah.

Sementara itu peran kelompok perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama juga mampu berkontribusi signifikan. Hal ini disebabkan mengingat potensi besar yang dimiliki dalam membangun dan merawat toleransi yang diperlukan dalam berbagai lingkup kehidupan sosial. Rahayu & Lesmana (2020) menemukan bahwa perempuan memiliki kemampuan sosial seperti berikut: penerimaan akan diri sendiri; penerimaan akan pengalaman; asertif; tahu apa yang diinginkan; berani mempertahankan hak; diri sendiri dimanfaatkan sebagai aset; gigih dalam menunjukkan kemampuan; kemauan untuk melatih diri sendiri. Selain itu, potensi besar yang juga dimiliki kelompok perempuan adalah kecenderungan untuk berkolaborasi dalam menciptakan perdamaian atas beragam konflik yang mungkin dapat timbul. Hal tersebut ditambah dengan sifat penyayang serta cinta kasih khas perempuan. Deretan potensi tersebut di atas, diyakini mampu mendorong penyemaian nilai-nilai moderasi beragama yang mampu dikerjakan oleh kelompok perempuan dimanapun mereka eksis dan berkarya.

Pada akhirnya, kampanye moderasi beragama adalah suatu sikap dan ekspresi publik terkini dari agama-agama di Indonesia (Sinaga, 2022) atas dasar beragam tindak intoleran dan eksklusif yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu di Republik ini. Dimana perjalanan panjang sejarah pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia seyogyanya berujung pada tercapainya inklusivitas dan kohesi sosial dalam segenap lingkup masyarakat. Bahwa inklusivitas dan kohesi sosial yang ingin dicapai sejalan dengan indikator moderasi beragama, yaitu sikap toleran; anti-kekerasan; akomodatif terhadap tradisi masyarakat lokal; dan mengedepankan spirit kebangsaan.

KESIMPULAN

Kampanye moderasi beragama telah menjadi jargon dan program unggulan dari kementerian agama yang telah menjadi wacana, sorotan dan urgensi publik dalam beberapa tahun belakangan ini. Pemerintah melalui beragam sosialisasi berupaya untuk membudayakan dan menginternalisasikan nilai dan indikator dari moderasi beragama ini. Hal ini dilakukan sesuai dengan *setting* pluralitas dan multikulturalitas dari masyarakat Indonesia yang seringkali melahirkan banyak tindakan radikal dan intoleran yang mampu menggerus inklusivitas dan kohesi sosial pada masyarakat.

Oleh karena itu, riset-riset telah menunjukkan bahwa sesungguhnya tindakan intoleran dan radikal tersebut dapat diuraikan lewat beragam upaya seperti memanfaatkan lembaga pendidikan pada berbagai jenjang sebagai laboratorium penyemaian bibit dan lahirnya kelompok intelektual yang moderat di masa depan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi dan ruang digital dengan cakupan dan keluasan penyiaran. Kemudian kekhasan basis nilai kearifan lokal juga terbukti dalam internalisasi nilai moderasi beragama, sebab dekat dengan budaya yang mengakar pada masyarakat lokal. Sedangkan yang terakhir dengan peran kelompok seperti guru dan perempuan dalam lokus paling *powerful* mereka dapat menjadi figur berpengaruh dalam melancarkan kampanye moderasi beragama ini. Dimana moderasi beragama dapat menuntut ketercapaian pada tiga pilar yaitu moderasi berpikir, moderasi bertindak dan moderasi gerakan.

REFERENSI

- Abdullah, T. (2009). Di Sekitar Masalah Agama dan Kohesi Sosial: Pengalaman dan Tantangan. *Masyarakat & Budaya*, 11(1), 1–23.
- Abidin, A. Z. (2021). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. *JIRA: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, 2(5), 729–736. <https://doi.org/10.47387/jira.v2i5.135>
- Afwadzi, B., & Miski, M. (2021). Religious Moderation in Indonesian Higher Educations: Literature Review. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 22(2), 203–231. <https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446>
- Aini, N., Aulia, I., & Zulfahmi, Z. (2022). Melawan Intoleransi dan Ekstremisme Media Sosial: Inovasi Kampanye Moderasi Beragama Kanal Youtube Labpsa Tv. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 3(1), 69–81. <https://doi.org/10.22373/j sai.v3i1.1687>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Desky, A. F. (2022). IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA HINDU BALI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KAMPUNG BALI KABUPATEN LANGKAT. In *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan* (Vol. 5, Issue 1).
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Gough, I., & Olofsson, G. (1999). *Capitalism and Social Cohesion* (I. Gough & G. Olofsson, Eds.; 1st ed.). Macmillan Press LTD.
- Hanafi, I. (2011). Membaca Pola Keberagamaan Umat Beriman. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2), 388–409.

- Hasan, M. (2021). Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa. *Jurnal Muftadiin*, 7(2), 110–123. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/muftadii>
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22.
- Luqmanul Hakim Habibie, M., Syakir Al Kautsar, M., Rochmatul Wachidah, N., & Sugeng, A. (2021). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Indonesia. In *Jurnal Moderasi Beragama* (Vol. 01, Issue 1).
- Macionis, J. J. (2012). Social Institutions: Religion. In C. Campanella (Ed.), *Sociology* (14th ed., Vol. 14, pp. 440–463). Pearson. www.sociologyinfocus.com.
- Muhamad Syaikhul, A., & Munib, A. (2021). Aktualisasi Pendidikan Moderasi Beragama di Madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim*, 9(2), 263–285.
- Nuridin, A., & Naqqiyah, M. S. (2019). Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 82–102.
- Pajarianto, H., Pribadi, I., & Sari, P. (2022). Tolerance between Religions through the Role of Local Wisdom and Religious Moderation. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 78(4). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7043>
- Purbajati, H. I. (2020). Peran Guru dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah. In *Peran Guru dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah Falasifa* (Vol. 11). <https://media.neliti.com/media/publications/318931-peran-guru-agama-dalam-menanamkan-moderasi>
- Purnomo, E., Al-Hidayat, S., & Rembang, I. (2022). Kronik Moderasi Beragama Pesantren dan Etnis Tionghoa di Lasem Rembang Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 1(1), 20–31. <http://journal.amorfati.id/index.php/amorti> | ISSN2 962-920920 <https://journal.amorfati.id/index.php/amorti>
- Rahayu, L. R., & Lesmana, P. S. W. (2020). Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia. *PUSTAKA*, XX(1), 31–37.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Saputera, A. R. A., & Djauhari, M. S. H. (2021). Potret Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Gorontalo. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 01(No. 1), 41–60.
- Sinaga, M. L. (2022). Moderasi Beragama: Sikap dan Ekspresi Publik Mutakhir Agama-Agama di Indonesia. *Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 333–344. <https://doi.org/10.55981/jmb.1821>
- Sumbulah, U., Purnomo, A., & Jamilah, J. (2022). Islam, Local Wisdom and Religious Harmony: Religious Moderation in East-Java Christian Village Bases. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 24(1), 21–39. <https://doi.org/10.18860/eh.v24i1.16264>
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 323–348.
- Syamsurijal, S., Raharjo Jati, W., & Halimatusa'diah, H. (2022). Moderasi Beragama dalam Islam Nusantara: Menimba dari Wali Songo. *Masyarakat Dan Budaya*, 24(3), 361–378. <https://doi.org/10.55981/jmb.1804>
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Ed.; 1st ed.). Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Wibisono, M. Y. (2021). *Agama dan Resolusi Konflik* (M. T. R. Rahman, Ed.; 1st ed.). Lekkas.